

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 226/M Tahun 1986;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
d. Nomor 64/M Tahun 1988.
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

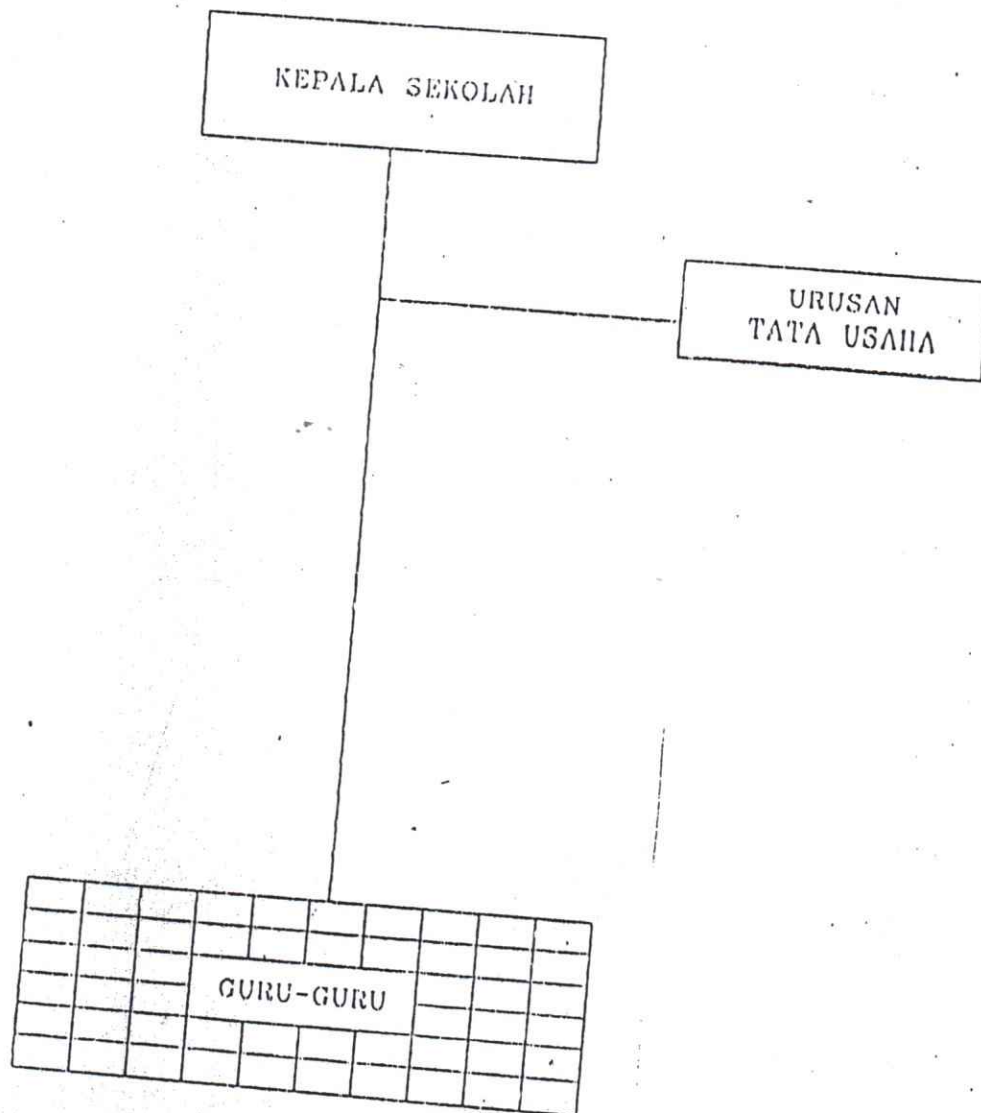
Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;

2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penerbitan menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor. 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor. 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

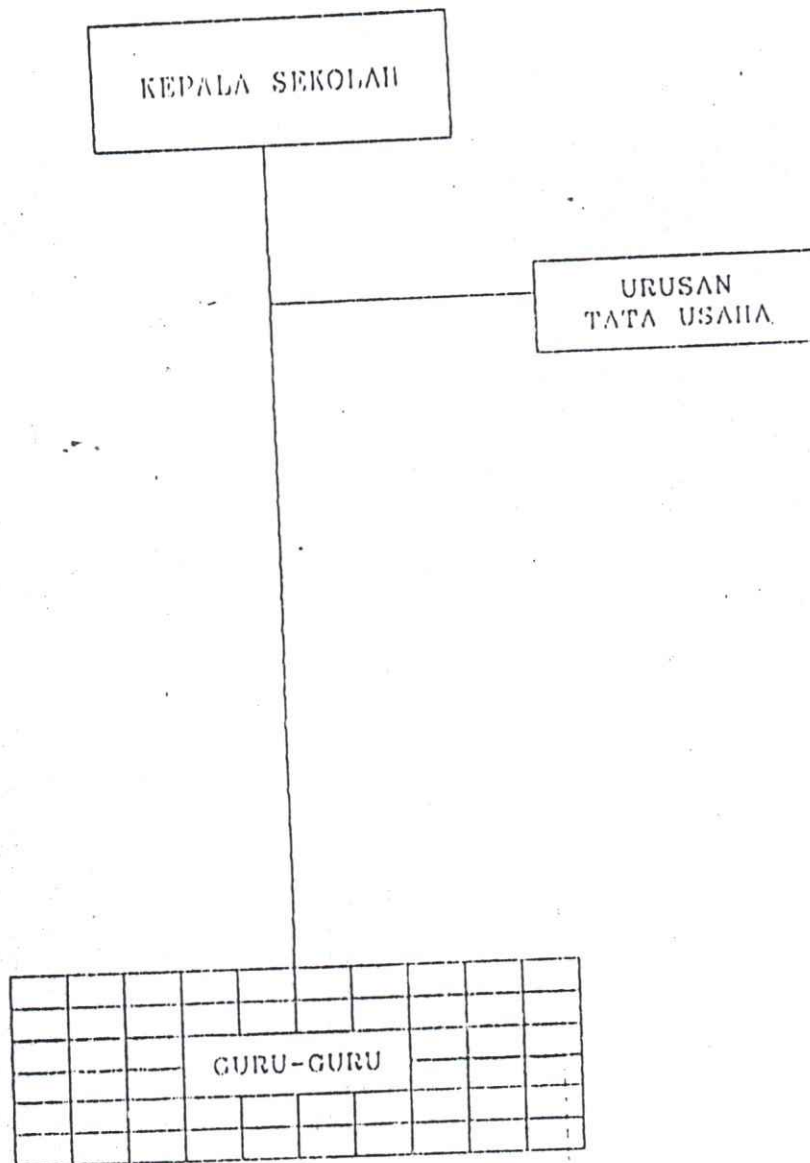
BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
ttd.

Fuad Hassan

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS

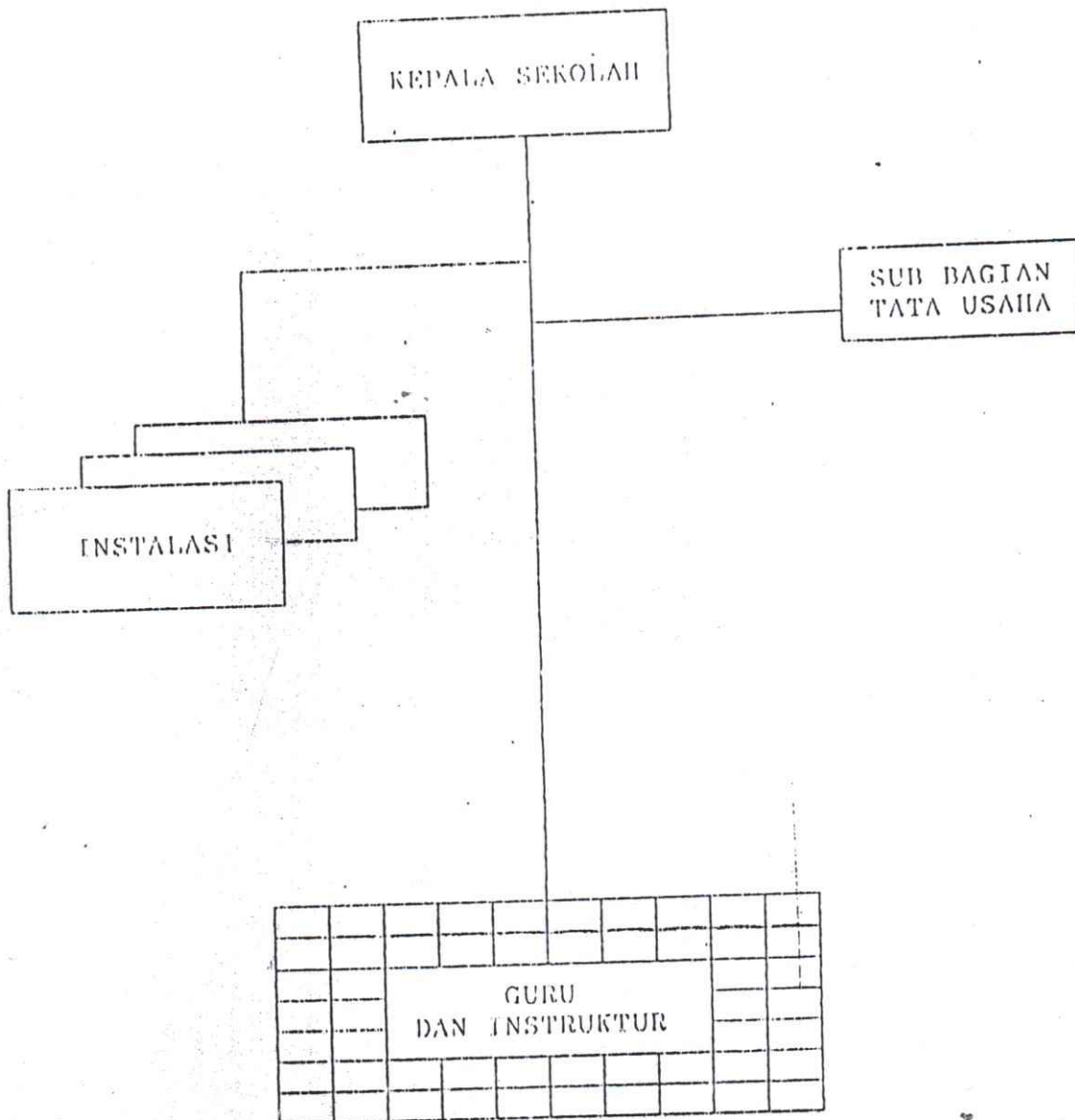


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS



a
a
a
a

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

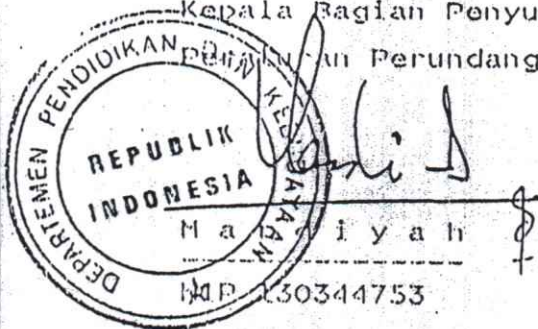
Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Perundang-undangan



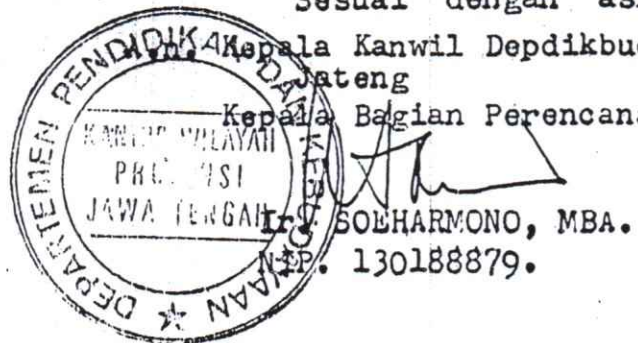
Mengetahui :

Sesuai dengan aslinya

Kepala Kanwil Depdikbud Prop.

Jateng

Kepala Bagian Perencanaan.



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TANGGAL : 5 Mei 1992
NOMOR : C216/C/1992

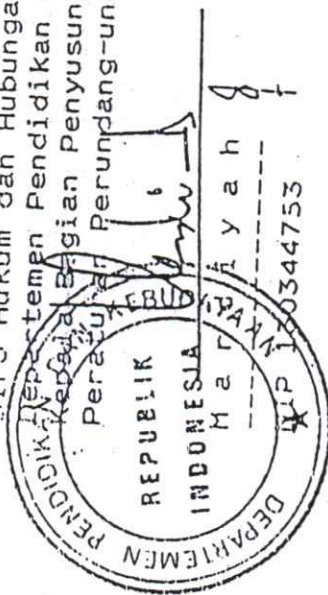
L O K A S I					MATA ANGGARAN	
No.	PROVINSI	SEKOLAH YANG DI- USULKAN	NAMA SEKOLAH ASAL	KECAMATAN	KAB/KODYA/KOTIP	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI JAKARTA					
A.	PENBUKAAN					
		1. SMP Negeri 269 Jakarta	-	Kemayoran	Kodya Jakarta Pusat	09.1.2.1038.23.01.01.5110 09.1.2.1038.23.01.01.5120 09.1.2.1038.23.01.01.5150 09.1.2.1038.23.01.01.5210 09.1.2.1038.23.01.01.5220 09.1.2.1038.23.01.01.5230 09.1.2.1038.23.01.01.5250 09.1.2.1038.23.01.01.5350
		2. SMP Negeri 270 Jakarta	-	K o j a	Kodya Jakarta Utara	
		3. SMP Negeri 271 Jakarta	-	Kebon Jeruk	Kodya Jakarta Barat	09.1.6.1102.23.01.01.5110 09.1.6.1102.23.01.01.5120 09.1.6.1102.23.01.01.5150 09.1.6.1102.23.01.01.5210 09.1.6.1102.23.01.01.5220 09.1.6.1102.23.01.01.5230 09.1.6.1102.23.01.01.5250 09.1.6.1102.23.01.01.5350
		4. SMIP Negeri 1 Jakarta	-	Pasar Minggu	Kodya Jakarta Selatan	

1	2	3	4	5	6	7
3.	JAWA TENGAH					
A.	PEMBUKAAN					
	1. SMP Negeri 2 Purwonegoro	-	Purwonegoro	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5110	
	2. SMP Negeri 3 Bawang	-	Bawang	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5120	
	3. SMP Negeri 2 Kalibening	-	Kalibening	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5150	
	4. SMP Negeri 2 Punggelan	-	Punggelan	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5210	
	5. SMP Negeri 2 Rakit	-	Rakit	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5220	
	6. SMP Negeri 6 Banjarnegara	-	Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5230	
	7. SMP Negeri 2 Patikraja	-	Patikraja	Kabupaten Banyumas	09.1.2.1038.23.01.04.5250	
	8. SMP Negeri 2 Sumbang	-	Sumbang	Kabupaten Banyumas	09.1.2.1038.23.01.04.5350	
	9. SMP Negeri 2 Pekuncen	-	Pekuncen	Kabupaten Banyumas		
	10. SMP Negeri 3 Limpung	-	Limpung	Kabupaten Batang		
	11. SMP Negeri 2 Tersono	-	Tersono	Kabupaten Batang		
	12. SMP Negeri 2 Bandar	-	Bandar	Kabupaten Batang		

1	2	3	4	5	6	7
		37. SMP Negeri 2 Bonang	-	Bonang	Kabupaten Demak	
		38. SMP Negeri 2 Karanganyar	-	Karanganyar	Kabupaten Demak	
		39. SMP Negeri 2 Pulokulon		Pulokulon	Kabupaten Grobogan	
		40. SMP Negeri 2 Godong		Godong	Kabupaten Grobogan	
		41. SMP Negeri 2 Penawangan		Penawangan	Kabupaten Grobogan	
		42. SMP Negeri 2 Gabus		Gabus	Kabupaten Grobogan	
		43. SMP Negeri 3 Bangsri	-	Bangsri	Kabupaten Jepara	
		44. SMP Negeri 2 Keling	-	Keling	Kabupaten Jepara	
		45. SMP Negeri 2 Mayong	-	Mayong	Kabupaten Jepara	
		46. SMP Negeri 2 Mlonggo	-	Mlonggo	Kabupaten Jepara	
		47. SMP Negeri 2 Jumentono	-	Jumentono	Kabupaten Karanganyar	
		48. SMP Negeri 2 Ngargoyoso	-	Ngargoyoso	Kabupaten Karanganyar	

1	2	3	4	5	6	7
B. PENEGERIAN		9. SMEA Negeri 1 Viqueque	SMEA Swasta Viqueque	Viqueque	Kabupaten Covalima	09.1.6.1102.23.01.27.5110 09.1.6.1102.23.01.27.5120 09.1.6.1102.23.01.27.5150 09.1.6.1102.23.01.27.5210 09.1.6.1102.23.01.27.5220 09.1.6.1102.23.01.27.5230 09.1.6.1102.23.01.27.5250 09.1.6.1102.23.01.27.5350
		10. SMEA Negeri 1 S a m e	SMEA Swasta S a m e	S a m e	Kabupaten Manufahi	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

Mengetahui :

Sesuai dengan aslinya
 A.n. Kepala Manwil-Depdikbud-Prop. Jateng
 Kepala Bagian Perencanaan



Ir. SOEHARMO, MBA.
 NIP. 130188879.